

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia pembangunan ekonomi masih menjadi prioritas utama, banyak yang dihadapi sehubungan dengan ekonomi. Pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berhasil memperbaiki kondisi perekonomian di Indonesia. Perbaikan masalah ekonomi ini dapat ditempuh dengan jalan memanfaatkan sumber daya manusia atau pun sumber daya alam. Sumber daya manusia tentu adalah hal yang sangat penting dalam pengembangan dan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang ada, karena sumber daya manusia yang rendah bisa menyebabkan kondisi masyarakat yang kurang mampu melihat dan juga mengatasi masalah di dalam kehidupan khususnya masalah ekonomi, yang kemudian akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dan akan berdampak pula pada peningkatan tingkat kemiskinan.

Dalam al-Qur'an, kata miskin bentuk jamaknya adalah *masaakiin* digunakan untuk menyebutkan kelompok yang berhak menerima bagian dari zakat (at-Taubah ayat 60) yang artinya : *sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Pengurus-pengurus zakat, para mua'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang untuk jalan Allah,*

dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam perekonomian yang harus dicarikan solusi untuk menyelesaikannya, hal ini tentu saja sangat penting diperhatikan agar terselesaikan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa daerah yang memiliki persentase tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain contohnya di Pulau Jawa, hal ini tentu saja disebabkan oleh banyak aspek, seperti minimnya lapangan kerja, kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai yang disebabkan dengan minimnya pengetahuan, ketergantungan masyarakat pada satu sektor mata pencaharian, kurang memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk dijadikan sumber mata pencaharian, dan lain sebagainya.

Dalam data BPS, provinsi yang tingkat kemiskinannya tertinggi salah satunya adalah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1.1.
Tingkat kemiskinan provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur tahun 2011-2016 (Dalam persen (%))

PROVINSI	2011	2012		2013		2014		2015		2016	
		SEM 1	SEM 2								
JAWA BARAT	9.26	8.84	8.71	8.44	8.69	8.47	8.32	8.43	8.58	7.67	7.55
JAWA TENGAH	14.12	13.49	13.11	12.87	12.53	12.68	11.5	11.85	11.5	11.44	11.38
DI YOGYAKARTA	13.16	13.13	13.1	13.43	13.73	13.81	13.36	13.43	11.93	11.79	11.68
JAWA TIMUR	9.87	9.06	8.9	8.57	8.9	8.35	8.3	8.19	8.41	7.94	7.91

Sumber : bps.go.id diolah excel 2010

Data diatas menunjukkan bahwa provinsi DIY memiliki tingkat kemiskinan yang tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Akan tetapi tingkat

kemiskinan di provinsi DIY menurun setiap tahunnya, hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai aspek salah satunya aspek pariwisata karena mengingat provinsi DIY merupakan destinasi wisata yang cukup digemari oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.

Tabel 1.2.
Jumlah PAD sektor wisata tahun 2011-2016 Provinsi DIY

Tahun	PAD sektor wisata (Rp)
2011	106.215.569.037
2012	153.174.399.477
2013	188.839.015.344
2014	236.955.587.690
2015	266,993,359,315
2016	353,913,365,540

Sumber : Buku Statistik kepariwisataan DIY 2017

Tabel diatas menunjukkan meningkatnya pad sektor wisata setiap tahunnya di Provinsi DIY yang kemudian tentunya memberikan dampak positif untuk pemasukan daerah di Provinsi DIY yang disebut dengan pendapatan asli daerah sektor pariwisata. Peningkatan pad sub sektor pariwisata ini juga dipengaruhi oleh berkembangnya tempat pariwisata yang sangat pesat yang kemudian menjadikan sumber daya alam di Provinsi DIY berubah menjadi tempat wisata yang menarik para wisatawan datang berkunjung Yogyakarta dan meningkatkan penghasilan asli daerah sektor pariwisata di DIY. Sektor pariwisata yang berkembang juga di dukung oleh usaha kecil dan menengah yang dimiliki oleh warga setempat yang kemudian bisa melengkapi kebutuhan para wisatawan saat mengunjungi tempat wisata tersebut.

PAD sektor pariwisata yang meningkat ini diharapkan bisa memberikan dampak yang baik pula untuk mengurangi tingkat kemiskinan DIY. Sektor pariwisata yang berkembang juga di dukung oleh usaha kecil dan menengah yang dimiliki oleh warga setempat yang kemudian bisa melengkapi kebutuhan para wisatawan saat mengunjungi tempat wisata tersebut,

Tabel 1.3.
Data persentase penduduk miskin
Di kabupaten/kota Provinsi DIY 2011-2015

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (Persen)				
	2015	2014	2013	2012	2011
D.I. Yogyakarta	14.91	14.55	15.03	15.88	16.14
Kulonprogo	21.4	20.64	21.39	23.32	23.62
Bantul	16.33	15.89	16.48	16.97	17.28
Gunungkidul	21.73	20.83	21.7	22.72	23.03
Sleman	9.46	9.5	9.68	10.44	10.61
Yogyakarta	8.75	8.67	8.82	9.38	9.62

Sumber data : Yogyakarta.bps.go.id

Dari data diatas, bisa dilihat bahwa persentase penduduk miskin berkurang setiap tahunnya dan meningkat kembali di tahun 2015.

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka judul dari penelitian ini adalah
“ANALISIS PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENGURANGAN KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”

B. Batasan Masalah

Mengingat ada begitu banyak masalah yang harus dipecahkan dalam analisis ini, agar pembahasan tidak terlalu luas dan tetap mengarah sesuai dengan judul yang diambil, maka perlu adanya pembatasan masalah. Dalam hal ini penulis berfokus pada pengembangan pariwisata guna pengurangan kemiskinan di provinsi DIY. Pada penelitian ini terdapat faktor yang mempengaruhi yakni : Penerimaan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata, Jumlah wisatawan, Jumlah Hotel, Jumlah Restoran, UMKM.

C. Rumusan Masalah

Provinsi DIY dikenal dengan jumlah tempat wisatanya yang beragam, akan tetapi provinsi DIY juga dikenal dengan salah satu provinsi yang miskin di Pulau Jawa. Dengan potensi pariwisata diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di DIY. Pengembangan pariwisata guna menurunkan tingkat kemiskinan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni Penerimaan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata, Jumlah wisatawan, Jumlah Hotel, Jumlah Restoran, UMKM.

Maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan asli daerah sektor pariwisata mempengaruhi tingkat kemiskinan DIY?

2. Apakah jumlah wisatawan mempengaruhi tingkat kemiskinan DIY?
3. Apakah jumlah hotel mempengaruhi tingkat kemiskinan DIY ?
4. Apakah jumlah restoran mempengaruhi tingkat kemiskinan DIY ?
5. Apakah UMKM mempengaruhi tingkat kemiskinan DIY ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, batasan masalah, dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata terhadap tingkat kemiskinan di DIY.
2. Mengetahui pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap tingkat kemiskinan di DIY.
3. Mengetahui pengaruh Jumlah Hotel terhadap tingkat kemiskinan di DIY.
4. Mengetahui pengaruh Jumlah Restoran terhadap tingkat kemiskinan di DIY.
5. Mengetahui pengaruh UMKM terhadap tingkat kemiskinan di DIY.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Analisis Pengembangan Sektor Pariwisata Guna Pengurangan Kemiskinan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat meningkatkan motivasi, wawasan dan pengetahuan yang lebih luas lagi dan juga dapat dijadikan bahas referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan membutuhkannya.

3. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerinatah daerah guna mengambil kebijakan dalam ranfka menjalankan upaya dalam pengembangan pariwisata guna pengurangan kemiskinan. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil kebijakan di masa yang akan datang.